

Leuser, Ladia Galaska, dan Egoisme

Teuku Kemal Fasya

KEINGINAN pemerintah melanjutkan pembangunan jalan Ladia Galaska (Lautan Hindia, Gayo, Alas, dan Selat Malaka) terus mendapat tantangan dari kelompok peduli lingkungan meski proyek telah diresmikan Presiden Megawati Soekarnoputri, 7 Maret lalu.

Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Soenarno dan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Abdullah Puteh serempak menuduh kelompok prolingkungan sebagai penjajah masyarakat pedalaman (*Bernas*, 12/3/2004). Mereka tak peduli dan balik menyerang, tercermin dari sikap koalisi 21 organisasi nonpemerintah untuk penyelamatan Leuser, meminta dunia internasional menghentikan hibah ke Indonesia karena sikap pemerintah tidak memiliki sense of crisis terhadap lingkungan (*Waspada Online*, 16/3/2004).

BERBICARA tentang kesejatan masyarakat pedalaman, agak sulit menyuling kebenaran nurani karena politik uang yang dilakukan penguasa. Sebanyak Rp 250 miliar anggaran telah dikururkan, termasuk dana "tutup mulut" bagi kelompok adat yang selama ini masih mempersoalkan pembangunan itu. Proyek ini sendiri amat prestisius, melihat dana yang disiapkan dari APBD dan APBN Rp 1,2 triliun (beberapa sumber menyebut lebih besar lagi) guna pembangunan jalan 470 kilometer.

Meski Megawati berjanji akan memperhatikan kelestarian lingkungan (saat peresmian pembangunan di Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh), banyak hal sulit terbukti sebagai fakta. Dari 16 ruas jalan yang menjadi proyek ini, sebagian besar jelas melewati hutan Leuser dan Taman Nasional. Kabupaten Gayo Lues, Aceh Tenggara, Bener Meriah, Aceh Tengah, Nagan Raya, dan Aceh Jaya merupakan jalur utama yang akan terancam serius karena berjajar di kawasan ekosistem Leuser sepanjang 102,5 kilometer. Kegiatan deforestasi ini akan menyebabkan kerugian hutan Rp 316,7 triliun (*Kompas*, 9/3/2004).

Dapat dibayangkan proyek yang disebut-sebut akan menghasilkan keuntungan ekonomis (karena membuka isolasi wilayah pedalaman Aceh) tidak berbanding dengan kerugian jangka panjang yang diterima masyarakat sekitar.

Pernyataan membuka isolasi juga mengandung kebohongan. Sejak zaman kolonial, ruas yang menghubungkan wilayah pantai barat dan timur Aceh telah ada. Di era Orde Baru jalan ini diperbarui dan memungkinkan lalu lintas lebih lancar dan nyaman. Jalur Lamno-Jantho-Seulawah lama dijadikan alternatif masyarakat dari daerah barat-selatan untuk melakukan perjalanan ke Pidie atau Lhok Seumawe, tanpa harus memutar dari Banda Aceh. Juga jalur Bireuen-Geumpang-Meulaboh menjadi jalan alternatif masyarakat pesisir timur untuk menuju daerah Takengon, menikmati alam dingin di daerah pedalaman, bahkan melanjutkan perjalanan ke daerah pesisir selatan Lautan Hindia. Jika demikian, mengapa pemerintah terus memaksakan kehendaknya mengatasnamakan rakyat pedalaman?

Enigma itu akan terjawab karena hutan merupakan sumber daya alam yang cukup menggiurkan bagi investasi ekonomi. Sikap barbarisme atas hutan bukan hanya sekarang. Sejak pemerintah Orde Baru memberlakukan sistem zonasi hutan di awal 1980-an dengan mengklaim lebih dari 78 persen hutan di Indonesia sebagai milik negara, masalah mulai muncul. Itulah sejarah terbesar pengambilalihan hak atas tanah yang pernah ada. Persoalan berakar karena reklamasi itu bentuk lain dari perampasan terhadap hak ulayat atas tanah masyarakat adat yang sebelumnya dikonservasi dengan "prinsip penyeimbangan" oleh adat lokal masing-masing.

Prinsip kepemilikan mengandung kerancuan konsepsional, tidak seperti yang terkandung dalam prinsip hukum di Barat. Kepemilikan pribadi (dimasukkan juga kepemilikan hak ulayat, kerancuan terbesar) diakui selama tidak bertentangan dengan keinginan negara.

Sebagai contoh, jika negara memutuskan membangun lapangan golf di daerah pinggiran Jakarta, hak keluarga petani setempat tidak diakui lagi meski mereka telah mengelola tanah itu turun-temurun. Sejak itulah berkembang favoritisme atas tanah hutan, ditambah mental korupsi yang menjalar di seluruh sistem kekuasaan Orde Baru, makin memuluskan pencurian hutan atas nama hak perusahaan hutan (HPH) dari pengusaha yang dekat dan bersedia menjilat ke kekuasaan.

FENOMENA di Leuser ibarat membuka album foto dengan momentum yang sama. Pemerintah melihat hak penguasaannya atas hutan sebagai cara menggemukkan devisa. Alhasil, keragaman hayati dalam lebat hutan, seperti Leuser, tidak menjadi prioritas perbincangan lagi.

Data seperti ini bahkan sama sekali tidak menarik perhatian. Sebagai hutan dipterocarpaceae tersubur ketiga di dunia, Leuser menjadi firdaus bagi tumbuh-tumbuhan seperti meranti, keruing, kapur, shorea, damar, dan pinus. Hampir 400 spesies burung, 129 mamalia, 171 reptil, 350 serangga, dan 80-an jenis ikan berdiam di hutan yang sebanding dengan hutan di Kongo dan Brasil.

Kekayaan biosfer dan perannya sebagai laboratorium konservasi habitat alam menempati posisi nomor satu di dunia, melebihi apa yang dimiliki hutan Meksiko. Beberapa satwa langka seperti burung kuda, siamang kaki putih, monyet daun perak, dan macan akar hanya ada di daerah ini.

Jika pembangunan proyek Ladia Galaska terus dijalankan dan eksploitasi 1,6 juta hektar terus dilanjutkan, beragam warisan dunia itu tinggal dongeng. Tindakan mengonversi wilayah pascapembalakan menjadi perkebunan kelapa sawit pun bukan jawaban untuk hutan dataran basah seperti Leuser. Kegagalan proyek penghijauan sejuta hektar lahan gambut di Kalimantan masa Soeharto sebaiknya menjadi pelajaran agar tidak bersikap sok tahu atas alam. Sebagian bencana telah tergepit.

Menurut penelitian terakhir National Herbarium Netherland, 50 persen dari 820 jenis anggrek yang ada di hutan Sumatera telah punah. Dengan pola eksplorasi hutan berjalan normal seperti sekarang, hanya butuh tiga tahun untuk membuat seluruh jenisnya lenyap dari Bumi. Tetap ingin tegar melihat bencana? Silakan!

Berbagai efek kerusakan sampingan (*collateral damage*) seperti perseteruan antaretnis mulai terlihat dengan pembangunan "16 jaring laba-laba". Terbukti gerusan konflik tidak sesederhana uang yang mengucur dari proyek yang hanya menguntungkan pengusaha dan penguasa. Berbagai efek menetes seperti pencurian kayu kian besar, dengan terbukanya banyak jalan baru. Dalam jangka panjang selimut tebal penderitaan akan tersingkap, seperti suhu udara yang kian panas akibat hancurnya hutan hujan, bencana banjir, tanah longsor, dan kekeringan berganti setiap silih musim, munculnya penyakit baru, dan tidak tertutup kemungkinan metamorfosis konflik separatisme berangkat dari masalah lingkungan.

Sinyal merah telah ditunjukkan Menteri Lingkungan Hidup Nabiel Makarim, yang meminta proyek Ladia Galaska dihentikan. Seharusnya fungsi logika sejalan aras konservatisme ini, bahwa sumber pengetahuan utama yang benar-benar berguna tentang hutan adalah masyarakat yang tinggal di hutan, bukan yang lain.

Permasalahan tak mungkin bertumpu pada tanggung jawab pemerintah, apalagi para pemegang HPH dan proyek pembangunan. Sudah saatnya keserakahan tidak ditunjukkan terhadap

pemberian Tuhan yang maha berharga ini. Tak sebarang pun kewenangan dapat dirampas dari nasib generasi mendatang atas keberadaan hutan.

Borok pertama yang mesti dikikis tidak lain kinerja pemerintah yang terpolusi egoisme pembangunan, yang melulu melihat potensi alam dengan kaca mata kuda. Kita tinggal mengambil kesempatan di pemilu ini, apakah mau menghentikan dukungan kepada pemimpin yang merusak lingkungan atau tidak?

Teuku Kemal Fasya Mahasiswa Magister Ilmu Religi dan Budaya Universitas Sanata Dharma,
Yogyakarta
Kompas, Selasa, 23 Maret 2004.